

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan.

a. Pengertian Kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya pendapatan, yang mengakibatkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan hal ini juga berakibat pada kualitas hidup, karena dengan rendahnya pendapatan juga akan berakibat pada kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar pendidikan, kesehatan (Sholekah, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan dari segi materi, pendapatan yang rendah menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. (Suryawati, 2005 dalam Ningrum, 2014).

b. Kriteria Kemiskinan.

Berdasarkan studi The SMERU Research Institute dalam menjelaskan ada sembilan kriteria yang menandai adanya kemiskinan, sebagai berikut :

- 1) Adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, seperti : sandang, pangan, dan papan.
- 2) Adanya ketidakmampuan untuk berusaha yang disebabkan oleh keterbatasan (cacat) fisik maupun mental.
- 3) Ketidakberuntungan dan ketidakmampuan dari segi sosial, seperti : janda miskin, wanita korban KDRT, kelompok yang terpencil dan marjinal, dan anak terlantar.
- 4) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan, dan buta huruf) dan adanya keterbatasan sumber daya alam.
- 5) Adanya kerentanan terhadap goncangan, yang pertama bersifat individual (rendahnya asset dan pendapatan), dan yang kedua bersifat massal (ketiadaan fasilitas umum, rendahnya modal sosial).
- 6) Tidak adanya akses terhadap lapangan pekerjaan yang memadai dan berkesinambungan.
- 7) Tidak adanya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup lainnya (transportasi, sanitasi, pendidikan, air bersih, dan pendidikan).

- 8) Tidak adanya jaminan untuk masa depan (tidak adanya investasi untuk hal-hal seperti pendidikan dan keluarga atau ketiadaan terhadap perlindungan sosial dari masyarakat dan Negara).
- 9) Ketidakikutsertaan dalam kegiatan sosial masyarakat.

b. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan dari hal yang bersifat alamiah (kultural) dan non-alamiah (struktural). Dan Spicker (2002) dalam Wiguna (2013) menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam empat mazhab, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Individual explanation*, dalam mazhab ini dijelaskan bahwa kemiskinan lebih cenderung disebabkan oleh sifat/karakteristik orang miskin itu sendiri. Yang dimaksud karakteristik dalam hal tersebut adalah seperti sifat malas, kurang bersungguh-sungguh, terkadang mereka juga kurang beruntung (salah dalam memilih, pekerjaan, tempat tinggal, jalan hidup, sekolah, dll) yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan bagi orang/individu itu sendiri, dan ada juga yang disebabkan karena keterbatasan fisik/cacat bawaan sehingga ia tidak mampu bekerja dengan baik.
- 2) *Familial explanation*, mazhab ini berpendapat bahwa penyebab kemiskinan disebabkan oleh faktor keturunan. Berawal dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang akan membawa pada kemiskinan, karena orang tua tidak mampu memberika pendidikan

yang layak bagi anaknya, sehingga pada akhirnya akan jatuh miskin, dan terus menerus secara turun menurun akan seperti itu berada pada kemiskinan yang sama.

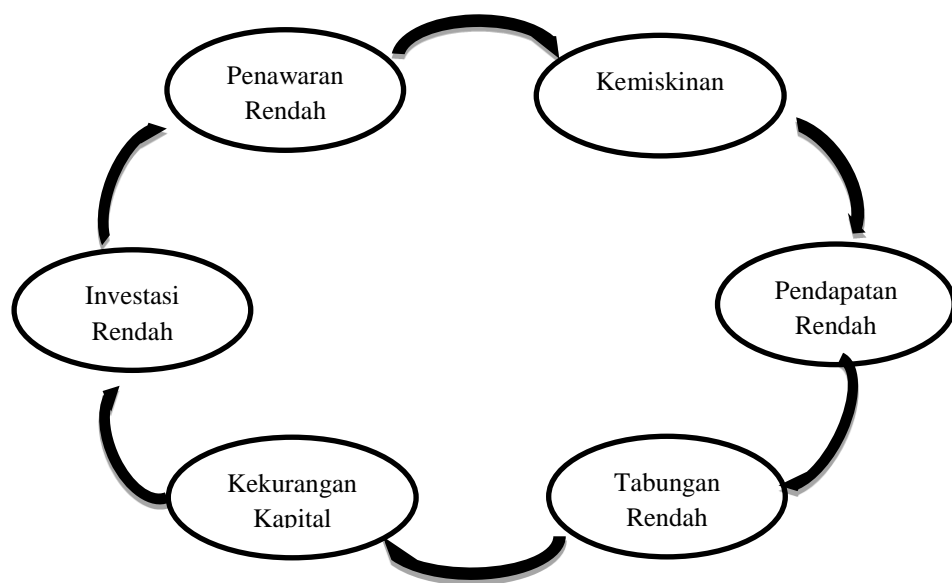
3) *Subcultural explanation*, mazhab ini berpendapat bahwa yang menjadi penyebab kemiskinan adalah kebiasaan, kultur, atau akibat dari karakteristik lingkungan sekitar, seperti pengabdian secara sukarela kepada raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran/upah, kebiasaan enggan bekerja dan menerima apa adanya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum wanita. Yang seperti ini mereka tidak akan merasa miskin karena sudah terbiasa dengan keadaan yang memang kulturnya demikian.

4) *Structural explanation*, mazhab ini berpendapat bahwa penyebab dari kemiskinan adalah adanya perbedaan status yang diciptakan oleh adat istiadat, ketidakseimbangan, kebijakan atau aturan yang memberikan kesan perbedaan hak seseorang dalam sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Hal seperti ini yang menimbulkan adanya perbedaan status diantara mereka, yang berstatus rendah dan haknya terbatas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan bisa berasal dari lingkungan (non alamiah) dan yang berasal dari diri sendiri (alamiah).

Hudiyanto (2015) menyatakan bahwa banyak penyebab kemiskinan yang bahkan sampai saat ini belum jelas secara pasti apa yang menjadi akar utama penyebab terjadinya kemiskinan, karena banyak

kemungkinan yang dapat menjadi penyebab kemiskinan itu sendiri. Lingkaran setan merupakan jalinan atau hubungan yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada kejelasan antara sebab dan akibat dari kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi permintaan dan sisi produksi.



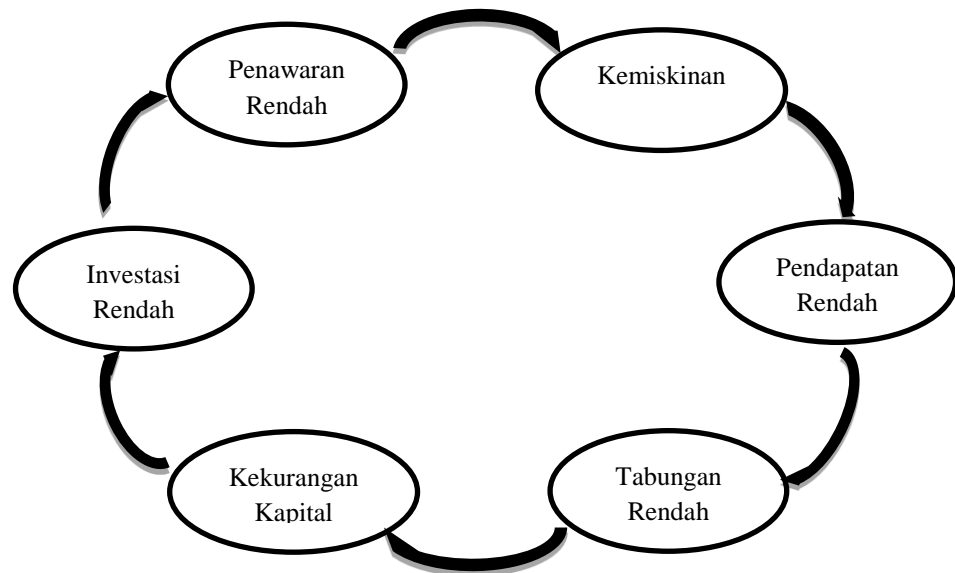
Sumber : Hudiyanto (2015)

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan dari Sisi Permintaan

Dapat disimpulkan dari gambar diatas dijelaskan bahwa kemiskinan menyebabkan rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan akan menyebabkan rendahnya tabungan, rendahnya tabungan akan menyebabkan kurangnya kapital seseorang, kekurangan kapital akan menyebabkan investasi yang rendah, investasi yang rendah akan menyebabkan penawaran yang rendah, dan penawaran yang rendah akan

menyebabkan kemiskinan. Dengan kata lain bahwa miskin menyebabkan miskin.



Sumber : Hudyanto (2015)

Gambar 2.2

Lingkaran Setan Kemiskinan dari Sisi Produksi

Sedangkan dapat dilihat dari gambar di atas, karena seseorang miskin maka produksi mereka pun akan rendah, produksi yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang rendah, pendapatan yang rendah akan menyebabkan daya beli atau demand/permintaan yang rendah, rendahnya daya beli akan menyebabkan kekurangan kapital, kurangnya kapital akan menyebabkan investasi dalam suatu Negara itu rendah, investasi yang rendah akan menyebabkan produksi yang rendah, produksi yang rendah akan menyebabkan kemiskinan. Maka dapat dikatakan miskin akan menghasilkan miskin.

c. Bentuk dan Jenis-Jenis Kemiskinan.

Menurut Suryawati (2005) dalam Prastyo (2010) menyatakan bahwa kemiskinan bukan berarti hidup dalam kekurangan uang dan pendapatan yang rendah saja, ada banyak hal lainnya seperti, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang rendah, ketidakberdayaan seseorang dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, adanya perlakuan yang tidak adil dalam ranah hukum, rentan terhadap ancaman tindak kriminalitas. Kemiskinan dibagi kedalam empat bentuk, adapun empat bentuk kemiskinan adalah sebagai berikut :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan standar hidupnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang nantinya diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya untuk mendapat pekerjaan.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi dimana kemiskinan itu terjadi karena akibat dari kebiasaan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor kebudayaan atau adat istiadat, dan pada umumnya mereka tidak ada kemauan untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya dengan tata cara yang lebih modern.

3) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi dimana kemiskinan itu terjadi akibat dari belum sempurnanya pengaruh kebijakan pembangunan di kalangan masyarakat, karena belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang menyebabkan adanya ketimpangan pada standar kesejahteraan atau ketimpangan pada pendapatan.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah suatu kondisi dimana kemiskinan ini terjadi karena rendahnya akses sumber daya yang biasanya terjadi pada suatu tatanan sosial politik dan sosial budaya yang kurang mendukung terhadap adanya pembebasan kemiskinan.

d. Ukuran Kemiskinan.

Ukuran kemiskinan atau standar kemiskinan menurut *World Bank* dalam Susanti (2013) diukur berdasarkan pendapatan per kapita, penduduk yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka dalam konteks ini ukuran kemiskinan menurut *World Bank* yaitu sebesar USD \$2 per orang dalam satu harinya.

Garis kemiskinan adalah tolak ukur atau suatu ukuran yang menyatakan besaran pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan, atau standar yang menyatakan batasan seseorang dapat dikatakan miskin jika dipandang dari sudut pandang konsumsi (Susanti, 2013).

2. Jumlah Penduduk

a. Pengertian Penduduk.

Penduduk adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah yang sewaktu-waktu dapat berubah karena adanya kelahiran, kematian, urbanisasi, dll. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Said (2001) dalam Sholekah (2016) berpendapat bahwa penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah dengan waktu tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hasil dari adanya proses demografi (mortalitas, fertilitas, dan migrasi).

b. Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk adalah suatu proses perubahan jumlah penduduk dan komposisinya yang dipengaruhi oleh tiga unsur komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Mulyadi, 2003). Rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penduduk} = \frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Jumlah penduduk pada tahun sekarang

$P_n - 1$ = Jumlah penduduk tahun sebelumnya

Maier dalam Saputra (2011) menyatakan bahwa di kalangan pakar pembangunan sudah ada konsensus mengenai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi itu berdampak buruk tidak hanya pada supply bahan pangan saja, akan tetapi memberikan kendala juga terhadap pengembangan tabungan, sumber daya manusia, dan cadangan devisa. Ada tiga alasan mengenai pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat menyebabkan semakin sulitnya untuk melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam hal upaya meningkatkan perubahan sosial dan ekonomi. Tingkat kelahiran yang tinggi menjadi salah satu faktor penyumbang utama dalam pertumbuhan kota yang cepat.
- 2) Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan dibutuhkan untuk meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang. Investasi dalam hal “kualitas manusia” akan semakin sulit, penyebabnya adalah karena sumber daya per kapita yang rendah akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat.
- 3) Pertumbuhan penduduk akan mengancam pada keseimbangan antara sumber daya alam yang langka/terbatas dan penduduk, dimana banyak Negara yang penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang

rendah produktivitasnya ke sektor pertanian yang modern dan pekerjaan modern lainnya (sektor industri).

Menurut Arsyad (2010) menyatakan bahwa ada beberapa masalah kependudukan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan antara lain adalah kurang seimbangnya mobilitas tenaga kerja dan pola penyebaran penduduk yang masih belum sempurna. Sedangkan menurut Samadi (2006) dalam Sholekah (2016) masalah kependudukan itu sudah berlangsung sejak lama dan hal ini selalu menjadi perhatian manusia. Sudah banyak para ahli dan negarawan yang membicarakan mengenai besarnya jumlah penduduk yang seimbang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan politik.

1) Aliran Malthusian

Dalam aliran ini Malthus menyatakan pendapatnya bahwa manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup, namun adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan bahan makanan. Karena, menurut Malthus laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan bahan makanan. Pertumbuhan penduduk bertambah sesuai dengan deret ukur, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan bertambah sesuai dengan deret hitung.

2) Aliran Neo-Malthusian

Aliran ini dipelopori oleh Paul Ehlich dan Garrett Hardin. Dalam aliran ini Paul menjelaskan bahwa kondisi penduduk dan lingkungan yang ada

pada saat ini adalah sebagai berikut : 1) Sudah terlalu banyaknya jumlah manusia di dunia, 2) Karena sudah terlalu banyaknya manusia di dunia ini, sehingga berakibat pada rusaknya dan tercemarnya lingkungan, 3) Persediaan bahan makanan yang terbatas.

3) Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Federich Eangels dan Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa tekanan penduduk yang ada dan terjadi di suatu Negara bukan disebabkan oleh adanya tekanan penduduk terhadap bahan makanan, akan tetapi tekanan itu terjadi antara tekanan penduduk terhadap tekanan kesempatan kerja di Negara tersebut. Menurut Karl Marx struktur masyarakat itu sendiri yang menjadi penyebab adanya kemiskinan atau kemelaratan, bukan terjadi karena terlalu cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

4) Teori Kependudukan Mutakhir

Teori kependudukan mutakhir ini depelopori oleh Jhon Stuard Mill, Arsene Dumont, dan Michael Thomas Sadler. Dalam teori kependudukan ini lebih menekankan pada kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi.

c. Struktur Penduduk.

Jenis kelamin dan umur/usia adalah dua karakteristik penduduk yang paling pokok, pada umumnya komposisi penduduk yang paling sering digunakan dalam berbagai macam bidang adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Komposisi penduduk menurut

umur biasanya dikenal juga dengan istilah struktur penduduk, dan struktur penduduk ini terbagi menjadi beberapa kelompok umur. Struktur penduduk di satu Negara akan berbeda dengan struktur penduduk Negara lainnya, antara perkotaan dan pedesaan pun berbeda, dan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya pun berbeda, karena struktur penduduk itu dipengaruhi oleh faktor demografis, yaitu mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Setiap kelompok umur memiliki jarak/interval antara umur 5 tahun, misalnya 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, ..., 60-64 tahun, 65+. Struktur penduduk menurut umur terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain sebagai berikut :

- 1) Umur 0-14 tahun, pada usia ini dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Jika di suatu wilayah atau Negara memiliki penduduk yang sebagian besar penduduknya berusia muda, maka wilayah atau Negara tersebut termasuk dalam kategori struktur penduduk muda.
- 2) Umur 15-64 tahun, pada usia ini dinamakan usia dewasa atau usia produktif atau usia kerja. Jika di suatu wilayah atau Negara memiliki penduduk yang sebagian besar penduduknya berusia dewasa, maka wilayah atau Negara tersebut termasuk dalam kategori struktur penduduk dewasa.
- 3) Umur 65 tahun dan lebih dari 65 tahun, pada usia ini dinamakan usia tua atau usia tidak produktif. Jika di suatu wilayah atau Negara memiliki penduduk yang sebagian besar penduduknya berusia tua, maka wilayah atau Negara tersebut termasuk dalam kategori struktur penduduk tua.

3. Pendidikan.

a. Pengertian Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal mendasar yang mana manusia dalam kerangka kehidupannya memerlukannya untuk mengendalikan segala hal yang menjadi kebutuhan primer dan sekunder. Wiguna (2013) mendefinisikan pendidikan sebagai salah satu pionir utama dalam proses pembangunan untuk masa depan suatu entitas di Negara karena pendidikan merupakan sarana pembangunan karakter, pertahanan jati diri manusia dalam suatu Negara. Oleh karenanya pendidikan menjadi fokus utama negara-negara maju di dunia karena dianggap menjadi sarana yang tepat untuk penghapusan kebodohan dan kemiskinan.

Berbeda dengan yang telah dikemukakan oleh Wiguna, Yunus (1990) dalam Sholekah (2016) lebih melihat definisi pendidikan dari segi nilai dan bentuk pendidikan sehingga Yunus mendefinisikan pendidikan sebagai suatu bentuk yang sangat memiliki pengaruh dan terdiri dari beberapa ragam pengaruh yang kemudian terpilih atas dasar tujuan yang telah di dapat untuk membantu anak-anak agar mampu untuk berkembang baik secara akal, pikiran dan jasmani.

Yunus kemudian lebih spesifik menjelaskan pendidikan dari tiga ranah tersebut, jika secara personal seseorang mampu mengolah akal yang menjadi landasan dirinya untuk berpikir maka ada hal yang akan didapat baik berupa jasmani maupun rohani. Hal tersebut adalah keselarasan dan kesejahteraan hidup. Jika dilihat dari sisi peraturan pemerintah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20

Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan berdasarkan asas usaha yang telah dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Definisi yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 lebih mengedepankan aspek yang lebih rinci dalam proses pemilihan setiap pilihan yang telah secara sadar oleh seseorang yang kemudian memiliki perencanaan yang jelas dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati.

Atas dasar definisi yang telah dikemukakan dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses mendidik, mengajar, mendewasakan, memberikan pemahaman dan pengertian kepada setiap generasi, baik remaja, maupun anak-anak untuk memperoleh atau mencapai sikap dan segala tata laku perbuatan yang lebih dewasa. Kedewasaan tersebut sangat bermanfaat bagi setiap orang agar mampu dan dapat melaksanakan tugas dalam kehidupannya sendiri, tanpa bergantung sama sekali pada orang lain. Pada intinya pendidikan memiliki tujuan utama agar orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan setelah tahu setiap orang mampu menjalankan keberpihakan positif dalam setiap kehidupannya agar lebih bisa

membedakan baik, buruk, dan moralitas serta norma kehidupan lainnya (Mahsunah, 2013).

b. Fungsi dan Manfaat Pendidikan.

Pendidikan sebagai unsur dan sarana yang sangat tepat untuk pengentasan kemiskinan, memiliki fungsi yang kemudian menjadi landasan utama bagi setiap Negara untuk memfokuskan pembangunannya terhadap pendidikan. Rahaju, dkk (2004) dalam Mahsunah (2013) memiliki pendapat tersendiri terhadap fungsi pendidikan bahwa fokus utama dalam fungsi pendidikan ada tiga yakni pendidikan sebagai penegak nilai, sarana pengembang masyarakat, dan upaya pengembangan potensi manusia. Sementara lain halnya dengan pendapat Ihsan (2008) dalam Mahsunah (2013) yang memberikan penjelasan bahwa fungsi pendidikan dibagi menjadi fungsi mikro dan makro, secara makro dijelaskan empat hal mendasar, yakni pengembangan Warga Negara, pengembangan pribadi, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa. Sedangkan dalam arti mikro adalah membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik.

Pembagian fungsi pendidikan secara mikro dan makro sangatlah tepat dalam ranah pengembangan pendidikan di suatu Negara, hal ini dikarenakan karena ada pemilahan ruang lingkup serta kriteria skala yang lebih membantu dalam pemahaman fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan sebenarnya sangat berkaitan erat dengan sektor ekonomi, politik dan sosial dalam suatu Negara. Setiap entitas masyarakat yang

ada dalam suatu Negara jika tidak memiliki pendidikan, sektor terlemah yang kemungkinan akan dialami adalah ekonomi. Lebih lanjut pendapat Todaro (1995) yang sangat jelas menjelaskan pentingnya dan berpengaruhnya pada sistem ekonomi di dunia, terlebih dalam negara berkembang, berikut fungsi dan nilai penting (manfaat) adanya pendidikan di setiap Negara :

- 1) Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif dan dibekali dengan tambahan pengetahuan dan ketrampilan.
- 2) Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan memperoleh sumber penghasilan yang lebih banyak bagi para guru, karyawan sekolah, para pemborong bangunan atau gedung sekolah, penerbitan buku-buku pelajaran, perusahaan pembuat pakaian seragam sekolah dan sebagainya.
- 3) Menciptakan suatu kelas pemimpin yang berpendidikan untuk mengisi jabatan-jabatan kosong di lembaga pemerintah dan perusahaan umum yang telah ditinggalkan oleh orang asing yang pulang kembali kenegaranya.
- 4) Memberikan bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, berhitung dan memiliki ketrampilan dasar, disamping memacu sikap-sikap *modern* penduduknya.

Dari empat hal yang telah dikemukakan oleh Todaro tersebut, sangat penting dalam proses pembangunan pendidikan yang ada dalam suatu

negara. Karena pendidikan sejatinya memberikan suatu pelatihan bagi peningkatan kemampuan dalam segi fisial, dan arti-fisial, hal tersebut mendukung penduduk di setiap Negara untuk lebih maju dalam proses berpikirnya.

c. Pendidikan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Hal terpenting dalam pendidikan adalah bagaimana dan sejauh mana pendidikan bisa menghadirkan solusi bagi permasalahan Negara, salah satu permasalahan negara yang sangat mendasar adalah kemiskinan. Salah satu sumber mekanisme dalam setiap penuntasan kemiskinan ialah pengembangan *human capital* dalam hal ini terutama pendidikan dan kesehatan, hal tersebut memberikan suatu makna bahwa perangkat terbesar dalam pengentasan kemiskinan adalah pendidikan, ada enam hal mengenai penuntasan kemiskinan dimana fokus pengembangan kualitas negara adalah berdasarkan fokus pengembangan terhadap sumber daya manusia, enam hal tersebut yakni menurut (Jeffry dan Sen, 2000 dalam Sholekah, 2016) :

- 1) Kapital manusia (*Human Capital*) terutama dalam kesehatan, gizi, dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kapital bisnis (*Bussines Capital*), sarana yang diperlukan didalam transportasi untuk pertanian, industry dan servis.
- 3) Infrastruktur: jalan, tenaga listrik, air minum, sanitasi, dan sebagainya.
- 4) Kapital alamiah (*Natural Capital*) berupa tanah pertanian, biodiversitas.

- 5) Kapital lembaga publik seperti hukum dagang, hukum peradilan, pelayanan pemerintah.
- 6) Kapital ilmu dan teknologi yang meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan *natural capital*.

Dari enam hal tersebut merupakan suatu tahapan-tahapan agar perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Hak dasar bagi seluruh masyarakat miskin, pendidikan adalah alat mobilitas vertikal yang sangat penting. Posisi ekonomi dalam masyarakat dapat diperoleh ketika suatu modal materiil tidak dimiliki.

Pada intinya menurut Sholekah (2016) kesempatan serta investasi dapat diperoleh hanya dengan pendidikan, karena dengan pendidikan kesempatan untuk hidup lebih baik dimasa depan dan proses pembangunan akan diperoleh. Dengan pendidikan terprogram baik, serta dapat menjangkau seluruh kualitas pengembangan SDM maka pendidikan menjadi salah satu instrument yang sangat efektif untuk memotong kemiskinan yang berada di negara-negara berkembang.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah atau biasa disingkat menjadi APS, merupakan suatu proporsi secara keseluruhan dari jumlah anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu dalam hal ini jumlah penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Jika jumlah APS tinggi maka hal tersebut menunjukkan bahwa peluang dalam akses pendidikan secara umum

pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat ditelaah dari hasil besaran APS pada setiap kelompok umur.

Dini Amaliah (2015) menerjemahkan suatu nilai dasar yang sangat penting dari angka partisipasi, pemahaman terkait dengan angka partisipasi dalam pendidikan akan sangat penting bagi seluruh sektor karena dari hal tersebut akan diketahui sejauh mana upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan telah dicapai, karakter atau variabel yang mengakibatkan ketidakmerataan atau kesenjangan dalam mengakses pendidikan. Jika lebih ditelaah kembali pemerintah pun menganggarkan 20% dari APBN dan APBD dalam pengelolaan dan penunjang peningkatan mutu pendidikan. Maka jika kita mengetahui angka partisipasi pendidikan masyarakat kita akan mengetahui besaran korelasi positif, terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

4. Kesehatan.

a. Pengertian Kesehatan.

Kesehatan merupakan unsur paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Arsyad (2010) mendefinisikan kesehatan masyarakat sebagai suatu alat kebijakan yang sangat penting dalam memerangi atau mengentaskan kemiskinan. Ada tiga faktor utama menurut Arsyad bahwa kesehatan dianggap suatu alat kebijakan, diantaranya:

- 1) Berkurangnya beban penderitaan secara langsung dapat memuaskan kebutuhan atas konsumsi barang-barang pokok.

- 2) Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja.
- 3) Penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tidak langsung berperan dalam mengurangi kemiskinan, tingkat kematian yang semakin rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan, namun membuat mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

Jika menelaah lebih dalam definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang menterjemahkan kesehatan sebagai suatu kondisi atau keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari definisi tersebut berarti pemerintah lebih menjelaskan kesehatan sebagai suatu kondisi untuk menunjang kehidupan produktif secara ekonomi dan sosial.

Secara umum pembangunan dari sektor kesehatan bertujuan khusus agar adanya peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi seluruh masyarakat, agar derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan dengan setinggi-tingginya. Hal tersebut merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Suharto (2013: 59) dalam Ningrum (2014) menjelaskan lebih dalam bahwa akses terhadap perawatan dalam kesehatan merupakan satu faktor yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Maka dari pada itu perlu kiranya jaminan kesehatan

sebagai pendorong pembangunan serta strategi penting dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

b. Angka Harapan Hidup (AHH).

Dalam Sirusa BPS angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup seseorang yang masih dan akan dijalani oleh orang tersebut yang telah berhasil mencapai umur x pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan sekitar masyarakat. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diiringi dengan suatu program pembangunan sosial dan pembangunan kesehatan lainnya termasuk juga program kesehatan lingkungan, kecukupan akan kalori dan gizi juga termasuk dalam program pemberantasan kemiskinan. Adanya peningkatan angka harapan hidup pada setiap tahunnya menggambarkan bahwa adanya peningkatan kehidupan yang lebih baik dan adanya peningkatan kesejahteraan.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Pengertian PDRB.

Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah akhir secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan semua unit usaha ekonomi di suatu wilayah/daerah atau dapat diartikan juga sebagai jumlah nilai tambah yang bersumber dari hasil seluruh unit usaha di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan adalah suatu nilai tambah dari barang dan jasa yang biasanya dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasarnya, dalam

perhitungan ini yang biasa digunakan sebagai tahun dasar yaitu tahun 2000. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah suatu nilai tambah dari barang dan jasa dalam perhitungan ini menggunakan harga pada setiap tahunnya.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun adalah dengan menggunakan PDRB harga konstan. Kuncoro (2011) berpendapat bahwa salah satu cara untuk melihat pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat dari pertumbuhan angka PDRB. PDRB dapat dengan baik menjadi alat ukur untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan yang menyebabkan terjadinya pendapatan nasional riil semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), dengan rumus sebagai berikut (Sukirno, 2012 dalam Hambarsari dan Inggit, 2016) :

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK tahun ini

PDRB0 = PDRB ADHK tahun sebelumnya

Ada tiga pendekatan atau cara untuk menghitung PDRB yaitu dengan pendekatan pendapatan, produksi dan pengeluaran, anatar lain sebagai berikut :

1) Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini dijelaskan bahwa PDRB merupakan imbalan yang diterima oleh faktor produksi yang ikut berkontribusi dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Yang dimaksud dengan imbalan adalah berupa gaji atau upah, bunga modal, sewa rumah, dan keuntungan (sebelum dipotong pajak langsung dan pajak penghasilan).

2) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan jumlah nilai tambah suatu barang dan jasa berasal dari hasil berbagai macam unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit produksi dibagi menjadi sembilan lapangan jenis usaha, yaitu sebagai berikut: 1) peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertanian, 2) penggalian dan pertambangan, 3) industri pengolahan, 4) listrik, air bersih, dan gas, 5) konstruksi, 6) restoran, perdagangan, dan hotel, 7) komunikasi dan pengangkutan, 8) real estate, keuangan, dan jasa perusahaan, 9) jasa-jasa.

3) Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik regional Bruto adalah seluruh bagian dari permintaan akhir yang terdiri dari : 1) pengeluaran seluruh konsumsi lembaga swasta nirlaba dan rumah tangga, 2) konsumsi pemerintah, 3) pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) perubahan inventori, dan 5) ekspor neto.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Arsyad (2010) dasar dari pemikiran teori pertumbuhan linear ini adalah adanya evolusi dalam proses pembangunana yang dihadapi oleh suatu Negara selalu melewati tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati secara beraturan atau berurutan oleh suatu Negara yang sedang membangun untuk menuju tingkat yang lebih tinggi lagi.

1) Teori Pertumbuhan Adam Smith.

Menurut Adam Smith ada lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi secara berurutan, yaitu diawali dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok-tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Pada teori ini berpendapat bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern (kapitalis), dalam hal ini Adam Smith memandang seorang pekerja adalah sebagai input atau modal yang penting bagi proses produksi. Dalam upaya untk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pembagian tenaga kerja dinilai sebagai hal yang sangat penting dan adanya spesialisasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi adalah sebagai berikut : 1) adanya peningkatan keterampilan pekerja, dan 2) penemuan mesin yang menghemat tenaga.

2) Teori Pembangunan Karl Marx.

Dalam teori ini Karl Marx membagi menjadi tiga evolusi perkembangan masyarakat, yaitu diawali dari feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Masyarakat feodalisme menggambar-

kan suatu kondisi perekonomian yang masih bersifat tradisional. Karl Marx juga berpendapat bahwa ada dua golongan pada masyarakat, yang pertama adalah masyarakat pemilik tanah, dan yang kedua adalah masyarakat pemilik modal.

3) Teori Pertumbuhan Rostow.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow merupakan garda depan dari *linear stage of growth theory*. Pada teori ini Walt Whitman Rostow menjelaskan bahwa ada lima tahap dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut : 1) tahap perekonomian tradisional, 2) tahap prakondisi tinggal landas, 3) tahap tinggal landas, 4) tahap menuju kedewasaan, dan 5) tahap konsumsi massa tinggi.

6. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

a. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan.

Menurut Maier dalam Sholekah (2016) menyatakan bahwa dalam hal pembangunan ekonomi di suatu daerah, jumlah penduduk menjadi masalah yang paling mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat terkendali akan mengakibatkan pada tidak tercapainya tujuan dari pembangunan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Telah adanya konsensus dikalangan para ahli pembangunan yang menyatakan bahwa dampak yang dihasilkan dari tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap *supply* bahan pangan saja, akan tetapi

berdampak juga pada pengembangan cadangan devisa, tabungan, dan sumber daya manusia. Ada dua pandangan mengenai pengaruh penduduk terhadap pembangunan, yang pertama yaitu pandangan optimis yang menganggap bahwa penduduk sebagai asset pembangunan yang dapat membantu mendorong pengembangan ekonomi sehingga nantinya akan dapat mendorong pada perbaikan kondisi sosial juga. Dan yang kedua adalah pandangan pesimistis, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat atau tinggi akan mendorong pada pengurasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, kekurangan tabungan, kehancuran ekologis, yang pada akhirnya akan berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan.

b. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan.

Menurut Todaro (2000) dalam Sholekah (2016) menjelaskan bahwa tujuan pembangunan yang paling mendasar adalah pendidikan, karena pendidikan memiliki peran kunci atau peran penting dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam hal menyerap teknologi modern dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas agar dapat terciptanya pembangunan serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan bantuan pendidikan, penduduk akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal pemahaman akan perekonomian, menggunakan dan memperoleh informasi, meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dll. Pendidikan bersamaan dengan

distribusi pendapatan memiliki hubungan positif dengan penghasilan/pendapatan seseorang. Hubungan ini dapat dilihat terutama dari seseorang yang lebih lama mengenyam bangku pendidikan akan memiliki pendapatan/penghasilan lebih tinggi yang berbeda sekitar 300 persen sampai 800 persen dibandingkan dengan seseorang yang hanya menyelesaikan sekolah sampai tingkat dasar atau dengan kata lain berpendidikan rendah. Seseorang dengan pendapatan rendah, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan kebutuhan pokok untuk makan sehari-harinya pun sulit, dan ini dapat dikatakan miskin. Maka, inilah salah satu penyebab adanya hubungan atau korelasi antara pendidikan dengan kemiskinan. Bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap kemiskinan jika dibandingkan dengan variabel pembangunan lainnya seperti, PDRB, penduduk, dan tingkat inflasi.

c. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan.

Dalam penelitian ini indikator kesehatan dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH), maka dapat dijelaskan bahwa kesehatan sebagai satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Di negara-negara yang memiliki tingkat derajat kesehatannya lebih baik, dari setiap individunya mempunyai rata-rata untuk hidup yang lebih lama, maka dari itu jika dilihat dari sisi ekonomis orang tersebut memiliki peluang untuk

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Arsyad (2010) berpendapat bahwa keikutsertaan pemerintah dalam memperbaiki kesehatan merupakan salah satu alat kebijakan yang penting dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan. Dan salah satu penyebab yang mendasari kebijakan ini ialah adanya peningkatan produktivitas masyarakat golongan miskin melalui perbaikan kesehatan, karena dengan kesehatan yang baik maka akan meningkatkan daya kerja seseorang, meningkatkan output energi, dan mengurangi hari tidak produktifnya atau hari tidak bekerjanya.

d. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan penambahan kesempatan kerja akan menciptakan ketimpangan dalam penambahan dan pembagian pendapatan, yang kemudian akan terciptanya pertumbuhan ekonomi dengan diikuti peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2013 dalam Dama, dkk, 2016). Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan saja, namun perlu juga memperhatikan sudah sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, serta siapa-siapa saja yang telah menerima dan menikmati hasilnya. Sehingga penurunan PDRB suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas dan konsumsi rumah tangga. Dan jika tingkat pendapatan penduduk terbatas, akan banyak penduduk atau rumah tangga miskin yang terpaksa merubah

pola konsumsinya terutama makanan pokok ke barang yang lebih dan paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan diberbagai wilayah oleh sejumlah peneliti dengan daerah/wilayah dan periode waktu yang berbeda-beda pula, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Sholekah (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta (Studi kasus Kabupaten/Kota Adm di Provinsi DKI Jakarta Periode 2008-2014)” bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*) dengan menggunakan data panel dan menggunakan pendekatan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi (2016) yang berjudul “Analisi Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan menggunakan pendekatan model efek random (*Random Effect Model*). Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk di Jawa Tengah, dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014” tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh secara parsial dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Durrotul Mahsunah (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur” tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur secara parsial dan bersama-sama. Jenis penelitian ini adalah eksplorasi asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama/simultan mempengaruhi variabel terikat. Variabel jumlah penduduk dan variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan variabel pengangguran memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sussy Susanti (2013) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel 2009-2011” bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB, IPM dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan menggunakan bantuan STATA 9. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Purnama Margareni, I Ketut Djayastira, dan I.G.W Murjana Yasa (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Bali” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) perkembangan penduduk miskin di Provinsi Bali, 2) pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) pengaruh pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan 4) pengaruh tidak langsung pendidikan, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah *Path Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

kemiskinan di Provinsi Bali, dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prastyo (2010) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode panel data dengan pendekatan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran, serta *dummy* wilayah secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap variabel Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
8. Penelitian ini dilakukan oleh Kurnia Dwi Rahmawati (2017) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013” yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran di DIY periode 2006-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY, Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY, dan Tingkat

Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di DIY.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Asriani Kurnia Ningrum (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Kesehatan, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Upah Minimum, Pengangguran, Kesehatan, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah berupa data sekunder dengan metode analisis yang digunakan adalah data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum, Pengangguran, Kesehatan, dan Pendidikan berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Tegar Rizki Akbar (2013) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur)” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa

Timur secara parsial dan simultan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kuantitatif perhitungan, metode dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda,. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur, namun hanya Tingkat Pengangguran yang memiliki pengaruh secara langsung atau secara signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur.

11. Penelitian ini dilakukan oleh Van Indra Wiguna (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2010” dengan tujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh negatif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010, 2) mengetahui pengaruh negatif dari Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010, 3) mengetahui pengaruh negatif dari Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares Regression Analysis*) menggunakan panel data dengan pendekatan model efek tetap (*Fixed Effect Model*) dengan bantuan *software E-Views 6*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah, Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah,

dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

12. Penelitian ini dilakukan oleh Yarlina Yacoub (2012) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kesiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat” dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan bantuan *software* SPSS 18.0, dan data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
13. Penelitian yang dilakukan oleh M Rifki Zulfikar (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012” bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang tidak

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2008-2012.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Whisnu Adhi Saputra (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah” dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares Regression Analysis*) panel data, dengan menggunakan pendekatan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Ardan Rifa’i (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Pengeluaran Pemerintah (Sektor Kesehatan dan Pendidikan) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Pengeluaran

Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda dan pendekatan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Angka Melek Huruf, dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Shaohua Chen dan Martin Ravallion (2007) yang berjudul "*Absolute Poverty Measures for The Developing World, 1981-2004*" yang membahas mengenai perkiraan tentang ukuran kemiskinan absolut bagi Negara berkembang pada periode 1981-2004. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya penurunan persentase orang atau penduduk yang dinyatakan benar-benar miskin, walaupun upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin ini belum maksimal dan belum merata di berbagai wilayah. Peneliti menemukan hal lain yang lebih berpengaruh dalam mengurangi jumlah penduduk atau orang miskin di Negara berkembang di luar Negara China. Adanya tanda-tanda kemajuan atau perkembangan yang baik dalam mengurangi penduduk miskin pada tahun 2000, yaitu dengan memberikan tunjangan atau upah yang lebih baik untuk biaya hidup yang lebih tinggi bagi penduduk miskin di perkotaan. Adanya urbanisasi di Negara berkembang ini lebih dominan dibandingkan dengan daerah yang lain, karena di Negara berkembang

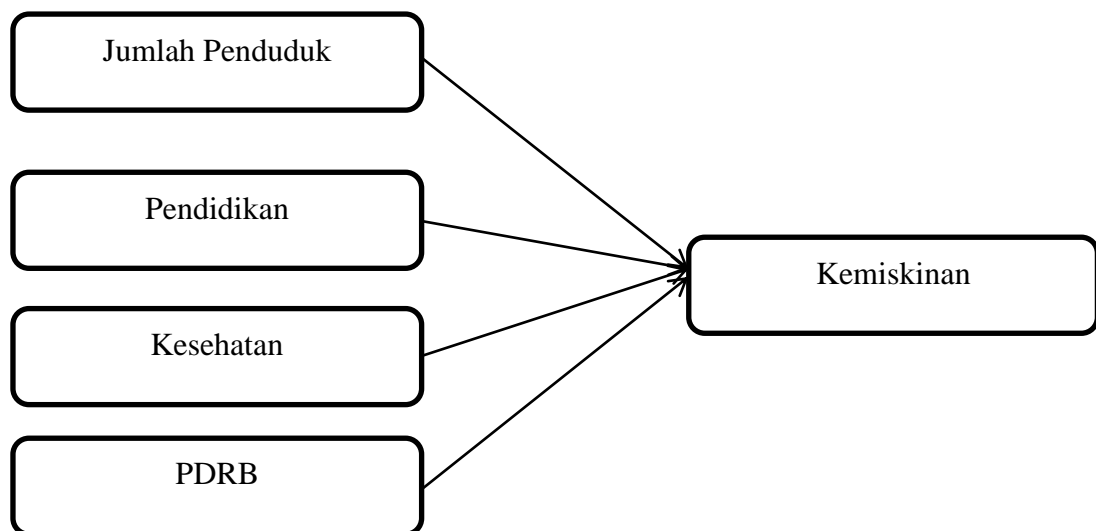
hampir satu perempat orang miskin melakukan urbanisasi ke perkotaan dan tiga perempatnya tetap tinggal di daerah pedesaan.

17. Penelitian ini dilakukan oleh Pauline M. Rose dan Caroline Dyer (2008) dengan judul "*Chronic Poverty and Education : A Review of Literature*" yang membahas mengenai keterkaitan antara pendidikan dengan kemiskinan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan dan memiliki kaitan yang positif terhadap pembangunan salah satunya dengan peningkatan produktivitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan untuk menunjukkan bahwa bagaimana pendidikan mempengaruhi perubahan kemiskinan antar generasi, dan memberikan penelitian yang inovatif mengenai kemiskinan dan pendidikan untuk memberikan pemahaman yang terperinci tentang bagaimana keterkaitan keduanya dalam memperbaiki kebijakan.
18. Penelitian ini dilakukan oleh Eliya M. Zulu, dkk (2011) dengan judul "*Overview of Migration, Poverty and Health Dynamics in Nairobi City's Slum Settlements*" membahas mengenai urbanisasi, kemiskinan, dan dinamika kesehatan untuk membantu pemerintah dalam proses pembangunan dengan memahami bagaimana konteks permukiman yang kumuh di perkotaan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitarnya dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesehatan yang buruk salah satunya ditunjukkan oleh permukiman penduduk yang kumuh, dan ada tiga karakteristik utama terkait

permukiman kumuh, yaitu: kondisi dan infrastruktur lingkungan yang buruk, akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan karena kurangnya pendapatan sehingga tidak memiliki biaya untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan yang layak, dan buruknya kualitas pelayanan kesehatan informal yang tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di lingkungan permukiman kumuh.

C. Model Penelitian

Dalam pembahasan ini akan dijabarkan mengenai kerangka pikir penelitian agar memudahkan dan memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut adalah gambar kerangka pemikiran yang skematis :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian, tentang adanya hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
2. Diduga variabel Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
3. Diduga variabel Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
4. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.